

PENGARUH IMPLEMENTASI GOOD PUBLIC GOVERNANCE DAN INTEGRITAS SISTEM PELAYANAN UNGGULAN TERPADU (SIPUTU) TERHADAP KINERJA KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM

^aI Gusti Ngurah Agung Ade Panji Anom, ^bI Gusti Ayu Agung Omika Dewi, ^cNi Luh Rika Suardani

^aKepolisian Resor Karangasem, ^{b,c}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar

^angr.agungpanji@gmail.com, ^bomikadewi@undiknas.ac.id

ABSTRAK

Pengaruh Implementasi Good Public Governance dan Integritas Sistem Pelayanan Unggulan Terpadu (SIPUTU) Terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip Good Public Governance serta Integritas Sistem Pelayanan Unggulan Terpadu (SIPUTU) terhadap kinerja Kepolisian Resor Karangasem. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu : (1) Good Public Governance yang terdiri atas lima prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Demokrasi, Budaya Hukum, dan Fairness; (2) Integritas; serta (3) Kinerja. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan teknik pengambilan sampel menggunakan Incidental Random Sampling. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil analisis data menemukan bahwa: (1) Akuntabilitas, Budaya Hukum, Fairness dan Integritas berpengaruh positif terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem; (2) Transparansi dan Demokrasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Kepolisian Resor Karangasem sudah dinilai baik karena telah didukung oleh implementasi dari prinsip-prinsip Good Public Governance serta integritas dari Sistem Pelayanan Unggulan Terpadu (SIPUTU). Namun untuk prinsip Transparansi (Keterbukaan) dan Demokrasi (partisipasi masyarakat) harus lebih ditingkatkan dalam penerapannya agar dapat lebih meningkatkan Kinerja Kepolisian Resor Karangasem, terutama dalam hal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Good public governance, integritas, kinerja

ABSTRACT

The Effect of the Implementation of Good Public Governance and the Integrity of the Integrated Excellent Service System (SIPUTU) on the Performance of Resort Police in Karangasem. This study aims to examine the effect of Good Public Governance (GPG) principles and the integrity of integrated excellent service system (SIPUTU) on the performance of Resort Police in Karangasem Regency. This study uses three main theories: (1) Good Public Governance which consist of five principles i.e. transparance, accountability, democracy, legal culture, and fairness; (2) integrity; and (3) performance. This study uses primary data collected by questionnaire with incidental random sampling technique. Data were analysed using multiple linear regression. The results of this study indicate that: (1) accountability, legal culture, fairness, and integrity have positive impacts on the performance of Resort Police in Karangasem; (2) transparance and democracy do not influence the performance of Resort Police. The results show that the Resort

Police in Karangasem has good performance since it has already supported by the implementation of Good Public Governance and the integrity of integrated excellent service system (SIPUTU). However, the transparency and democracy principles still need to be improved in order to further increase police performance, specifically in providing public services to society.

Keywords: *Good public governance, integrity, performance*

PENDAHULUAN

Isu terkait korupsi dan pungli dewasa ini semakin menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) masih terjadi di sektor pelayanan publik. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2016 diketahui bahwa kasus suap dan pungli tertinggi terjadi di institusi Kepolisian dan Pemda. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan instansi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah atau organisasi publik adalah dengan menerapkan *Good Public Governance*.

Good Public Governance (GPG) adalah suatu pengelolaan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara negara yang berupa sistem atau aturan perilaku dalam menjalankan tugas dengan akuntabel dan bertanggung jawab. Untuk mencegah terjadinya suap, korupsi, pungli dan sejenisnya, GPG ini sangat penting diterapkan agar pemerintahan dalam perjalanannya bisa selalu patuh terhadap hukum. Selama ini pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan yang prima, melalui inovasi pelayanan publik serta implementasi GPG. Dengan adanya inovasi pada pelayanan publik serta implementasi GPG diharapkan masyarakat dapat lebih merasakan terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Salah satu institusi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat adalah institusi kepolisian. Fungsi pelayanan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terlepas dari semua itu setiap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya.

Kepolisian Resor Karangasem adalah Institusi Kepolisian yang merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Daerah Bali berlokasi di ujung timur pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Karangasem. Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Karangasem khususnya, jajaran Kepolisian Resor Karangasem mengeluarkan suatu inovasi sistem baru yang dikenal dengan sebutan Sistem Pelayanan Unggulan Terpadu (SIPUTU). Sistem ini terdiri dari dua jenis tipe pelayanan yang bersifat stasioner (tetap) dan *mobile* (berpindah-pindah). Program SIPUTU yang bersifat stasioner yaitu Pondok Terpadu dimana Polres Karangasem menggabungkan tiga pelayanan publik yang meliputi pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Sidik Jari, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ditempatkan dalam satu gedung yang sama yang dilengkapi dengan sistem antrean digital, pojok baca, ruang ibu dan anak, dan fasilitas pendukung lain termasuk fasilitas bagi kalangan difable, serta sarana informasi-informasi mengenai Polri dan penerangan pelayanan untuk menambah kenyamanan masyarakat, diruangan tersebut. Gedung pelayanan publik tersebut juga sudah dilengkapi dengan fasilitas BRI corner dengan sistem pembayaran *cash money*, *bri-link*, *internet banking*, serta e-money untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa harus meninggalkan gedung atau menitipkan pembayaran kepada petugas kepolisian. Ada juga Program Tedun Banjar yaitu

dalam pemberian pelayanan SIM, Sidik Jari, dan SKCK dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat sampai tingkat banjar dan desa, dimana pelayanan ini merupakan tipe pelayanan dari program SIPUTU yang bersifat *mobile*.

GPG sangatlah penting untuk diimplementasikan dalam institusi pemerintahan termasuk institusi kepolisian guna memastikan agar kinerja institusi tersebut tetap baik. KNKG (2008) menyatakan bahwa setiap lembaga negara harus memastikan bahwa asas GPG diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan fungsinya. Adapun asas GPG yang dimaksud adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam pengaruhnya terhadap kinerja sektor publik khususnya institusi kepolisian adalah integritas, karena sangat erat kaitannya dengan komitmen. Seseorang yang gagal dalam berkomitmen menunjukkan lemahnya integritas dalam diri orang tersebut. Integritas adalah suatu karakter yang berkaitan dengan norma, pola pikir dan peraturan yang berlaku. Integritas diri berkaitan dengan sikap selalu mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. Integritas seseorang dapat dilihat dari bersikap jujur dan berani, bijaksana, transparansi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Penelitian terdahulu terkait GPG dalam kaitannya dengan kinerja telah dilakukan oleh Setiyawan dan Safri (2016) mengenai analisis pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bungo menemukan bahwa kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu penelitian Salwa (2018) terkait integritas dalam pengaruhnya terhadap kinerja menemukan bahwa komitmen, integritas dan kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Di antara ketiga variabel eksogen tersebut, variabel yang pengaruhnya paling dominan terhadap kinerja pegawai adalah komitmen, kemudian menyusul integritas di urutan kedua dan kompetensi di urutan ketiga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait GPG dan integritas dalam kaitannya dengan kinerja yang dilaksanakan pada institusi kepolisian mengingat penelitian tersebut belum pernah dilakukan pada institusi kepolisian, khususnya Polres Karangasem. Polres Karangasem dipandang memiliki peran penting dalam pelayanan publik terutama dalam pelaksanaan SIPUTU bagi masyarakat Kabupaten Karangasem. Dengan implementasi GPG dan menjaga integritas pelaksanaan SIPUTU diharapkan agar Polres Karangasem dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Stewardship Theory

Teori ini dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Integrative Leadership Theory

Integrative leadership menurut Huxman & Vangen di jurnal (Srimulyani 2016) didefinisikan sebagai kolaborasi antar individu, proses dan struktur. *Integrative Leadership* yaitu kepemimpinan yang mengintegrasikan variabel kemampuan, perilaku, fitur, sikap, gaya dan situasional dalam sebuah model teoritis tunggal untuk menjelaskan efektivitas organisasi. *Integrative Leadership* juga didefinisikan sebagai integrasi dari perilaku kepemimpinan terhadap tugas, hubungan dan perubahan (Srimulyani 2016).

Integrative leadership adalah pendekatan kepemimpinan yang mengembangkan konsep kepemimpinan terpadu dengan mengintegrasikan lima peran kepemimpinan yang penting untuk kesuksesan pemimpin di sektor publik yaitu: kepemimpinann berorientasi pada

tugas; kepemimpinan berorientasi pada hubungan; kepemimpinan berorientasi pada perubahan; kepemimpinan berorientasi pada keragaman, dan kepemimpinan berorientasi pada integritas.

Good Public Governance

Good Public Governance (GPG) adalah suatu pengelolaan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara Negara yang berupa sistem atau aturan perilaku dalam menjalankan tugas dengan akuntabel dan bertanggung jawab. Pola hubungan antara penyelenggara Negara dan masyarakat, antara penyelenggara Negara dan lembaga Negara, serta antar lembaga Negara akan diatur dalam GPG. GPG harus bisa dipastikan sudah diterapkan di setiap lembaga Negara dalam setiap aspek pelaksanaan fungsi. Asas GPG adalah transparansi, akuntabilitas, demokrasi, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Transparansi

Transparansi adalah suatu unsur pengungkapan untuk setiap informasi agar mudah didapatkan dan diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperuntukan kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan Negara agar berjalan secara obyektif. Transparansi juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga negara serta penyelenggara negara untuk merahasiakan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

Demokrasi

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.

Budaya Hukum

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law inforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya Hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap lembaga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk membangun sistem dan budaya hukum secara berkelanjutan baik dalam proses penyusunan dan penetapan perundang-undangan serta kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dilaksanakan secara konsekuen.

Fairness

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggungjawab.

Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih mentaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya lembaga negara dan penyelenggara negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Integritas

Integritas menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia Praktis yaitu kejujuran, mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas sering dipahami dalam konteks perilaku dan perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral. Keadaan berperilaku dengan integritas diharapkan muncul bukan hanya karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk berintegritas, tetapi karena individu tersebut memahami dengan baik bahwa memiliki integritas adalah bagian dari proses untuk membangun sesuatu yang lebih baik di dalam keluarga, organisasi, atau Negara menurut Dwi Prawani Sri Redjeki dan Jefri Heridiansyah dalam penelitian (Yulianti 2015).

Menurut Sukriah, dkk dalam (Yulianti 2015) Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi lembaga/organisasi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang pegawai untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

Kinerja

Pengertian kinerja menurut A. Dale Timple dalam jurnal (Rondonuwu 2017) dipersamakan dalam Bahasa Inggris yaitu "*performance*". Kata *performance* sendiri bila dilihat dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai daya guna, prestasi atau hasil. Sehubungan dengan pernyataan hal diatas, Aman Sudarto (1999:2) menjelaskan bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu orang yang dilakukan oleh individu, yang dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat diukur. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur.

METODE

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Karangasem yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Amlapura. Program baru yang dimiliki oleh polres karangasem adalah Sistem Pelayanan Unggulan Terpadu yang dikenal sebagai sebutan SIPUTU. Sistem Pelayanan Unggulan Terpadu adalah kegiatan pelayanan publik secara terpadu diantaranya pelayanan SIM, SKCK dan sidik jari. Dengan adanya program SIPUTU, Kepolisian Resor Karangasem mengharapkan bisa memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat khususnya Kabupaten Karangasem secara Profesional, Modern dan Terpercaya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem yang menggunakan sistem pelayanan terpadu di Polres Karangasem. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden di Polres Karangasem. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Incidental Random Sampling*, yakni teknik penentuan responden penelitian yang dilakukan secara tiba-tiba berdasarkan siapa saja yang ditemui oleh peneliti yang kebetulan sedang menggunakan SIPUTU di Polres Karangasem.

Pengukuran variabel *Good Public Governance*, Integritas, dan Kinerja Kepolisian mengenai pelaksanaan SIPUTU menggunakan instrumen yang dikembangkan dari indikator masing-masing variabel dan disesuaikan dengan keadaan responden. Instrumen pernyataan meliputi instrumen pernyataan untuk variabel *GPG*, pernyataan untuk variabel integritas dan pernyataan untuk variabel kinerja kepolisian mengenai SIPUTU. Instrumen pernyataan ini menggunakan skala likert 5 poin dengan meminta responden menunjukkan pilihan antara

sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju dari setiap pernyataan yang diajukan dalam kuisioner.

Sebagai upaya untuk memastikan apakah instrumen penelitian tersebut valid dan reliabel maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0.3 ke atas maka faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat. Uji reliabilitas dilakukan dengan menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Kemudian data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Adapun pengujian hipotesis pada penelitian ini akan melalui 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji Hipotesis 1, Hipotesis 2, sampai dengan Hipotesis 6. Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat berpengaruh positif atau negatif. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah *good public governance* dan integritas, serta untuk variabel terikat adalah kinerja kepolisian mengenai sistem pelayanan terpadu. Jika dimasukkan pada formulasi regresi berganda, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_6 X_6 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja kepolisian

a = Konstanta

X1 = Transparansi, X2 = Akuntabilitas, X3 = Responsibilitas, X4 = Independensi

X5 = *Fairness*, X6 = Integritas

β_1 sampai β_6 = Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

e = Faktor Pengganggu

2. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R²*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen yaitu *good public governance* dan integritas mempengaruhi kinerja sistem pelayanan terpadu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika *Adjusted R²* bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan uji statistik f yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam formulasi regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini digunakan uji f untuk menguji *Good Public Governance* dan integritas secara simultan terhadap kinerja kepolisian mengenai pelaksanaan SIPUTU. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 9% atau 0.09. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.09 , maka hipotesis diterima begitupun sebaliknya.

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menguji hipotesis digunakan uji statistik t yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar *Good Public*

Governance dan Integritas secara parsial terhadap kinerja kepolisian. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 9% atau 0.09. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $< \alpha$, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai *r* hitung (*corrected item total correlation*) terhadap skor total di atas 0,30 (Sugiyono 2017). Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 1. Variabel keterbukaan nilainya antara 0.520-0.787, akuntabilitas nilainya antara 0.750-0.890, demokrasi nilainya 0.536-0.738, budaya hukum 0.805-0.933, kewajaran nilainya 0.675-0.862, integritas nilainya 0.679-0.905 dan kinerja memiliki nilai antara 0.431-0.739. Nilai *Pearson Correlation* berada di atas 0,30 yang artinya pernyataan kuisioner dari ketujuh variabel tersebut adalah valid.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	Corrected Item- Total Correlation	Keterangan
1	Keterbukaan (X ₁)	Keterbukaan1	0.627	Valid
		Keterbukaan2	0.722	Valid
		Keterbukaan3	0.666	Valid
		Keterbukaan4	0.738	Valid
		Keterbukaan5	0.706	Valid
		Keterbukaan6	0.756	Valid
		Keterbukaan7	0.520	Valid
		Keterbukaan8	0.787	Valid
		Keterbukaan9	0.745	Valid
2	Akuntabilitas (X ₂)	Akuntabilitas1	0.830	Valid
		Akuntabilitas2	0.778	Valid
		Akuntabilitas3	0.750	Valid
		Akuntabilitas4	0.845	Valid
		Akuntabilitas5	0.890	Valid
		Akuntabilitas6	0.869	Valid
3	Demokrasi (X ₃)	Demokrasi1	0.611	Valid
		Demokrasi2	0.594	Valid
		Demokrasi3	0.594	Valid
		Demokrasi4	0.745	Valid
		Demokrasi5	0.536	Valid
		Demokrasi6	0.677	Valid
		Demokrasi7	0.738	Valid
		Demokrasi8	0.673	Valid
		Demokrasi9	0.573	Valid
4	BudayaHukum (X ₄)	BudayaHukum1	0.920	Valid
		BudayaHukum2	0.931	Valid
		BudayaHukum3	0.933	Valid
		BudayaHukum4	0.837	Valid
		BudayaHukum5	0.805	Valid
		BudayaHukum6	0.927	Valid
5	Kewajaran (X ₅)	Kewajaran1	0.791	Valid
		Kewajaran2	0.862	Valid
		Kewajaran3	0.858	Valid

		Kewajaran4	0.736	Valid
		Kewajaran5	0.675	Valid
		Kewajaran6	0.737	Valid
6	Integritas (X6)	Integritas1	0.679	Valid
		Integritas2	0.749	Valid
		Integritas3	0.754	Valid
		Integritas4	0.868	Valid
		Integritas5	0.897	Valid
		Integritas6	0.905	Valid
		Integritas7	0.831	Valid
		Integritas8	0.850	Valid
		Integritas9	0.848	Valid
7	Kinerja (Y)	Kinerja1	0.582	Valid
		Kinerja2	0.609	Valid
		Kinerja3	0.588	Valid
		Kinerja4	0.713	Valid
		Kinerja5	0.431	Valid
		Kinerja6	0.736	Valid
		Kinerja7	0.651	Valid
		Kinerja8	0.715	Valid
		Kinerja9	0.633	Valid
		Kinerja10	0.699	Valid
		Kinerja11	0.739	Valid
		Kinerja12	0.711	Valid
		Kinerja13	0.668	Valid

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 2, menunjukkan bahwa seluruh variabel yakni keterbukaan, akuntabilitas, demokrasi, budaya hukum, kewajaran, integritas dan kinerja memiliki *Alpha Cronbach* > 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dikatakan reliabel.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Keterangan
1	Keterbukaan	0.908	Reliabel
2	Akuntabilitas	0.941	Reliabel
3	Demokrasi	0.884	Reliabel
4	Budaya hokum	0.965	Reliabel
5	Kewajaran	0.921	Reliabel
6	Integritas	0.955	Reliabel
7	Kinerja	0.906	Reliabel

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode – metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keterbukaan	123	3.33	5	4.3469	0.44139
Akuntabilitas	123	2.5	5	4.355	0.48846
Demokrasi	123	2.67	5	4.0564	0.45515
Budaya Hukum	123	2	5	4.3523	0.52799
Kewajaran	123	3.5	5	4.3266	0.44527
Integritas	123	2	5	4.1761	0.74793
Kinerja	123	3.54	5	4.3771	0.43541
Valid N (listwise)	123				

Berdasarkan Tabel 3, dapat dijelaskan deskripsi secara umum hasil penelitian sebagai berikut. Variabel keterbukaan memiliki nilai minimum sebesar 3.33 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata 4.3469 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 0.44139. Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 2.5 dan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata 4.355 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 0.48846. Variabel demokrasi memiliki nilai minimum sebesar 2.67 dan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata 4.0564 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 0.45515. Variabel budaya hukum memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata 4.3523 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 0.52799. Variabel Kewajaran memiliki nilai minimum sebesar 3.5 dan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata 4.3266 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 0.44527. Variabel Integritas memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata 4.1761 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 0.74793. Variabel kinerja memiliki nilai minimum 3.54 dan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata 4.3771 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 0.43541.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk pengujian asumsi klasik diawali dengan uji normalitas dimana apabila *Asymp.Sig* (2-tailed) > α (0.09) maka disimpulkan data terdistribusi normal (Ghozali 2013). Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Data

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		123
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0.4469
	<i>Std. Deviation</i>	0.18675
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.092
	<i>Positive</i>	0.092
	<i>Negative</i>	-0.086
<i>Test Statistic</i>		0.092

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.200^{c,d}

Berdasarkan Tabel 4.4 ditunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 ($0,200 > 0,09$) bahwa model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen. Tidak adanya masalah multikolinieritas jika nilai *tolerance* diatas 0,1 dan VIF dibawah 10. Berdasarkan table 5 menunjukkan nilai Tolerance masing-masing variabel independen sudah diatas 0,1 dan VIF dibawah 10 sehingga dapat dikatakan tidak adanya multikolinieritas, artinya tidak ada hubungan yang tinggi antar variabel independen.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas Data

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1 (Constant)	0.733	0.297		2.473	0.015		
Keterbukaan	0.048	0.087	0.049	0.559	0.577	0.402	2.486
Akuntabilitas	0.163	0.077	0.183	2.129	0.035	0.421	2.377
Demokrasi	0.065	0.062	0.068	1.043	0.299	0.743	1.345
Budaya Hukum	0.165	0.068	0.200	2.427	0.017	0.458	2.183
Kewajaran	0.294	0.080	0.301	3.681	0.000	0.466	2.145
Integritas	0.112	0.046	0.193	2.449	0.016	0.502	1.992

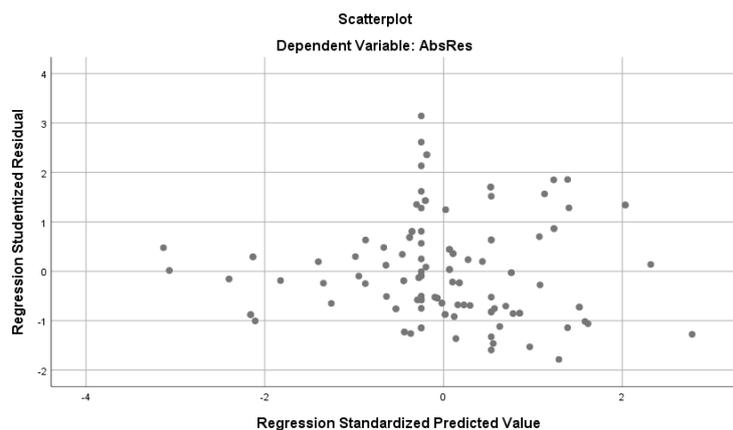
Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain. Berdasarkan table 6 diperoleh nilai signifikansi pada semua variabel sudah diatas 0,09 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat berdasarkan grafik scatterplot. Berdasarkan grafik diperoleh titik-titik atau plot data menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Data

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.113	0.161		0.703	0.483
Keterbukaan	0.047	0.047	0.145	1.007	0.316
Akuntabilitas	0.008	0.041	0.029	0.204	0.839
Demokrasi	0.014	0.033	0.044	0.420	0.676
Budaya Hukum	-0.053	0.037	-0.193	-1.438	0.153
Kewajaran	0.031	0.043	0.095	0.720	0.473

Integritas	-0.025	0.025	-0.127	-0.994	0.322
------------	--------	-------	--------	--------	-------



Gambar 1 Grafik Heterokedastisitas

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berpengaruh positif atau negatif. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah *good public governance* dan integritas, serta untuk variabel dependen adalah kinerja kepolisian mengenai sistem pelayanan terpadu.

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.733	0.297		2.473	0.015
Keterbukaan	0.048	0.087	0.049	0.559	0.577
Akuntabilitas	0.163	0.077	0.183	2.129	0.035
Demokrasi	0.065	0.062	0.068	1.043	0.299
Budaya Hukum	0.165	0.068	0.200	2.427	0.017
Kewajaran	0.294	0.080	0.301	3.681	0.000
Integritas	0.112	0.046	0.193	2.449	0.016

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_6 X_6 + e \dots \dots \dots (1)$$

$$= 0,733 + 0,048X_1 + 0,163X_2 + 0,065X_3 + 0,165X_4 + 0,294X_5 + 0,112X_6$$

Berdasarkan dari model regresi di atas, hasil yang didapatkan sebagai berikut. Nilai konstanta 0.733 menunjukkan jika variabel keterbukaan (X1), akuntabilitas (X2), demokrasi (X3), budaya hukum (X4), kewajaran (X5), dan integritas (X6) bernilai konstan, maka variabel kinerja kepolisian (Y) memiliki nilai positif sebesar 0,733. Keterbukaan (X1) memiliki nilai koefisien 0,048, hal ini menggambarkan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan variabel Keterbukaan (X1) dapat meningkatkan nilai kinerja kepolisian (Y) sebesar 0,048 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap atau konstan. Akuntabilitas (X2) memiliki nilai koefisien 0,163, ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel akuntabilitas (X2) dapat meningkatkan nilai kinerja kepolisian (Y) sebesar 0,163 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Demokrasi (X3) memiliki nilai koefisien 0,065, ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel demokrasi (X3) dapat meningkatkan nilai kinerja kepolisian (Y) sebesar 0,065. Budaya hukum (X4) memiliki nilai koefisien 0,165, ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel budaya hukum (X4) dapat meningkatkan nilai kinerja kepolisian (Y) sebesar 0,165. Kewajaran (X5)

memiliki nilai koefisien 0,294, ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kewajaran (X5) dapat meningkatkan nilai kinerja kepolisian (Y) sebesar 0,0,294. Integritas (X6) memiliki nilai koefisien 0,112, ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel integritas (X6) dapat meningkatkan nilai kinerja kepolisian (Y) sebesar 0,112 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Koefisiensi Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan penambahan variabel independen yang tepat untuk menambah daya prediksi model.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799 ^a	.639	.620	.26837

Berdasarkan table 8 nilai korelasi yaitu 0,799 yang menunjukkan besarnya hubungan dari variabel keterbukaan, akuntabilitas, demokrasi, budaya hukum, kewajaran, integritas terhadap kinerja. Hasil koefisien determinasi diatas yaitu 0,639 yang dapat dikatakan variabel keterbukaan, akuntabilitas, demokrasi, budaya hukum, kewajaran, integritas mampu mempengaruhi kinerja sebesar 63,9% sedangkan sisanya sebesar 36,1 akan dipegaruhi oleh variabel lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Uji Statistik f

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9
Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.774	6	2.462	34.190	.000 ^b
	Residual	8.354	116	.072		
	Total	23.129	122			

Uji ini dapat terlihat pada output table 9. Adanya pengaruh secara bersama-sama antar variabel independen jika nilai F hitung lebih besar dari F table dan signifikansi lebih kecil dari 0,09. Nilai F hitung yaitu 34,190 dan signifikansi 0,000 sehingga nilai F hitung lebih besar dari F table (1.88) dan signifikansi lebih kecil dari 0,09, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh simultan dari variabel keterbukaan, akuntabilitas, demokrasi, budaya hukum, kewajaran, integritas terhadap kinerja.

Uji Statistik t

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menguji hipotesis apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali 2013). Sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan di dalam penelitian ini, maka berdasarkan Tabel 7 hasil pengujian hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

1. Variabel keterbukaan memiliki nilai t hitung 0,559 dan signifikansi 0,577 sehingga nilai signifikansi lebih besar dari 0,09, sehingga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel keterbukaan terhadap kinerja.
2. Variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung 2,129 dan signifikansi 0,035 sehingga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,09, sehingga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel akuntabilitas terhadap kinerja. Nilai koefisien regresi 0,163 yang dapat

- diartikan adanya pengaruh positif, artinya semakin baik akuntabilitas maka kinerja akan semakin meningkat.
3. Variabel demokrasi memiliki nilai t hitung 1,043 dan signifikansi 0,299 sehingga nilai signifikansi lebih besar dari 0,09, sehingga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel demokrasi terhadap kinerja.
 4. Variabel budaya hukum memiliki nilai t hitung 2,427 dan signifikansi 0,017 sehingga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,09, sehingga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel budaya hukum terhadap kinerja. Nilai koefisien regresi 0,165 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif, artinya semakin baik budaya hukum maka kinerja akan semakin meningkat.
 5. Variabel kewajaran memiliki nilai t hitung 3,681 dan signifikansi 0,000 sehingga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,09, sehingga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel kewajaran terhadap kinerja. Nilai koefisien regresi 0,294 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif, artinya semakin baik kewajaran maka kinerja akan semakin meningkat.
 6. Variabel integritas memiliki nilai t hitung 2,449 dan signifikansi 0,016 sehingga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,09, sehingga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel integritas terhadap kinerja. Nilai koefisien regresi 0,112 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif, artinya semakin baik integritas maka kinerja akan semakin meningkat.

Nilai 0,09 merupakan nilai error maksimal yang ditolerir, artinya ada 9% kesalahan dalam penelitian yang ditolerir oleh peneliti. Lebih lanjut diartikan bahwa penelitian ini dapat dikatakan 91% benar.

Pengaruh Implementasi Prinsip Transparansi Terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem

Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kepolisian Resor Karangasem dengan nilai t hitung 0,559 dan nilai signifikansi $0,577 > \alpha = 0,09$ sehingga H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat transparansi (keterbukaan) dalam pelaksanaan SIPUTU tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan ataupun penurunan kinerja kepolisian pada Polres Karangasem.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan Windiarso (2015) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan adalah melalui penerapan prinsip *good corporate governance*, dimana salah satu dari elemen *good corporate governance* tersebut adalah transparansi. Setiyawan dan Safri (2016) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Saribu (2017) yang meneliti tentang pengaruh transparansi terhadap kinerja pegawai di BPKAD di Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip *Good Public Governance* yaitu transparansi terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di BPKAD di Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian dari Astuti (2013) yang menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Responden penelitian adalah pegawai dan karyawan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kualitas pelayanan dengan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.

Pengaruh Implementasi Prinsip Akuntabilitas Terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem

Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas dalam (KNKG 2008) menyebutkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur serta memenuhi prinsip akuntabilitas baik yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, proses pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan maupun penyusunan dan pelaksanaan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja kepolisian resor Karangasem dengan nilai t hitung = 2,129 dan nilai signifikansi $0,035 < \alpha = 0,09$ sehingga H_1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dalam pelaksanaan SIPUTU maka kinerja kepolisian resor Karangasem juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Putri and Putra (2017) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan kinerja adalah melalui penerapan prinsip akuntabilitas. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Susanto, Yusuf, dan Rachmawati (2014) yang menyatakan bahwa penerapan *Good Public Governance*, yang salah satunya adalah prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pemberian layanan publik. Hasil penelitian ini juga didukung dengan teori *stewardship* dimana setiap yang dilakukan bisa dipercaya dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Astuti (2013) yang menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Responden penelitiannya adalah pegawai dan karyawan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. Jitmau, Kalangi, and Lambey (2017) juga menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Sorong.

Pengaruh Implementasi Prinsip Demokrasi Terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem

Demokrasi diartikan sebagai penyelenggara negara yang mampu mendengar, memilah, memilih, dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan berpegang pada kepentingan negara dan masyarakat. Asas demokrasi terdiri atas tiga unsur yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja kepolisian resor Karangasem dengan nilai t hitung 1,043 dan nilai signifikansi $0,299 > \alpha = 0,09$ sehingga H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat demokrasi atau responsivitas dalam pelaksanaan SIPUTU tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan ataupun penurunan kinerja kepolisian pada Polres Karangasem.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putri and Putra (2017) yang menunjukkan bahwa prinsip responsivitas tidak berpengaruh terhadap kinerja. Responsivitas sama artinya dengan demokrasi yaitu suatu lembaga publik yang mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *basic need* (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya).

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uar (2016) dalam penelitiannya menyatakan *Good Public Governance* yang berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas atau ketanggapan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik di kota Ambon. Hasil penelitian Putra (2014) yang berjudul pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik terhadap kinerja organisasi layanan publik juga menyatakan hasil yang berbanding terbalik dengan hasil penelitian ini, dimana penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi publik mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja organisasi layanan publik.

Pengaruh Implementasi Prinsip Budaya Hukum Terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem

Budaya hukum disini diartikan sebagai suatu kebiasaan yang setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Setiap penyelenggara Negara harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara professional, jujur dan taat asas, sehingga terhindar dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya hukum berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja kepolisian resor karangasem dengan nilai t hitung = 2,427 dan nilai signifikansi $0,017 < \alpha = 0,09$ sehingga H_1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi budaya hokum dalam pelaksanaan SIPUTU maka kinerja kepolisian resor Karangasem juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori *stewardship* dimana teori ini menggambarkan para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih diutamakan kepada tujuan organisasi. Dengan termotivasi untuk mengutamakan kepentingan umum bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian kinerja kepolisian resor Karangasem dalam memberikan pelayanan publik akan meningkat sejalan dengan peningkatan prinsip budaya hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hasthoro 2016), ia menyatakan bahwa jika variabel budaya hukum ini naik satu satuan maka kinerja keuangan daerah juga akan naik. Variabel budaya hukum (indeks persepsi korupsi) menunjukkan arah positif terhadap kinerja.

Pengaruh Implementasi Prinsip Kewajaran Terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja kepolisian resor karangasem dengan nilai t hitung = 3,681 dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,09$ sehingga H_1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kewajaran dalam pelaksanaan SIPUTU maka kinerja kepolisian resor Karangasem juga akan semakin meningkat.

Oleh karena itu merujuk dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mendukung atau searah dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Susanto, Yusuf, and Rachmawati 2014) dengan judul pengaruh *Good Public Governance* terhadap kualitas pemberi pelayanan publik. Penelitian tersebut menemukan bahwa secara parsial *Good Public Governance* yang didalamnya terdapat prinsip *fairness* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pemberian layanan masyarakat. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri and Putra (2017) yang menemukan bahwa prinsip kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh Implementasi Prinsip Integritas Terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integritas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja kepolisian resor karangasem dengan nilai t hitung = 2,449 dan nilai signifikansi $0,016 < \alpha = 0,09$ sehingga H_1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi integritas dalam pelaksanaan SIPUTU maka kinerja kepolisian resor Karangasem juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) dimana penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pada inspektorat provinsi Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kinerja Auditor pada inspektorat provinsi Riau. Hasil penelitian Utami (2015) juga menyatakan bahwa integritas dapat meningkatkan kinerja pegawai yang artinya integritas berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sujiyanto (2017) yang menemukan bahwa integritas berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang ada pada dinas komunikasi dan informatika kota Batu.

Penelitian ini juga didasari oleh *integrative leadership theory* yaitu pendekatan kepemimpinan yang mengembangkan konsep kepemimpinan terpadu dengan

mengintegrasikan peran kepemimpinan untuk kesuksesan pemimpin di sektor publik. Dalam penelitian Srimulyani (2016) dengan judul analisis *integrative leadership* terhadap *organization justice*, *employee engagement* dan *organizational citizenship behavior* menyatakan *integrative leadership* berpengaruh secara signifikan terhadap *employee engagement*, dengan arah positif. *Engagement* merupakan variabel yang berpengaruh terhadap produktivitas atau kinerja. Sehingga dapat diketahui bahwa integritas diakui berpengaruh positif terhadap kinerja.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Keterbukaan (transparansi) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja kepolisian resor Karangasem dengan nilai signifikansi $0,577 > \alpha = 0,09$, sehingga H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat transparansi (keterbukaan) dalam pelaksanaan SIPUTU tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan ataupun penurunan kinerja kepolisian pada Polres Karangasem.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja kepolisian resor Karangasem dengan nilai signifikansi $0,035 < \alpha = 0,09$ sehingga H1 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas, maka kinerja kepolisian resor Karangasem juga akan semakin meningkat.
3. Demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepolisian resor Karangasem dengan nilai signifikansi $0,299 > \alpha = 0,09$, sehingga H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat demokrasi atau responsivitas dalam pelaksanaan SIPUTU tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan ataupun penurunan kinerja kepolisian pada Polres Karangasem.
4. Budaya hukum terdapat pengaruh secara positif terhadap kinerja kepolisian resor Karangasem, dengan nilai signifikansi $0,017 < \alpha = 0,09$ sehingga H1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi budaya hukum, maka kinerja kepolisian resor Karangasem juga akan semakin meningkat.
5. Kewajaran berpengaruh terhadap kinerja kepolisian resor Karangasem dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,00 < \alpha = 0,09$ sehingga H1 diterima. Adanya pengaruh positif, artinya semakin baik kewajaran maka kinerja kepolisian resor Karangasem akan semakin meningkat.
6. Integritas berpengaruh positif terhadap kinerja kepolisian resor Karangasem dengan nilai signifikansi $0,016 < \alpha = 0,09$ sehingga H1 diterima. Hal ini berarti semakin baik integritas, maka kinerja kepolisian resor Karangasem akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya semakin buruk integritas maka kinerja akan turut mengalami penurunan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin bisa dibenahi pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu referensi penelitian sebelumnya dengan topik yang sama sulit untuk didapatkan, sehingga tidak bisa membahas secara detail mengenai bukti empiris mengenai implementasi *Good Public Governance* (GPG) yang ada di aparatur negara dan pemerintahan (organisasi nirlaba) di Indonesia. Keterbatasan yang lain adalah temuan bahwa transparansi (keterbukaan) dan demokrasi atau responsivitas tidak berpengaruh terhadap kinerja kepolisian resor Karangasem, sehingga bertentangan dengan teori dan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode yang berbeda sehingga bisa menemukan penyebab dari tidak berpengaruhnya variabel transparansi dan demokrasi terhadap kinerja.

REFERENSI

- Astuti, Ratih Muji. 2013. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Naskah Publikasi*.
- Hasthoro, Handoko A. 2016. "Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- Di Indonesia." *jurnal Ekonomi dan Bisnis* XIX(1): 53–68.
- Jitmau, Fanny, Lintje Kalangi, and Linda Lambey. 2017. "Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)." *Jurnal Ekonomi*: 276–85.
- KNKG. 2008. "Good Public Governance Indonesia Diterbitkan Oleh :." *Komisi Nasional Kebijakan Governance*: 1–50.
- Putra, Hendra G. 2014. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman MODal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat)." *Artikel Ilmiah*.
- Putri, Ni Kadek Desy Yasinta, and I Made Pande Dwiana Putra. 2017. "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21: 1660–88.
- Rondonuwu, Bill Christian. 2017. "Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan." *Physical Review B* 72(10): 1–13.
- Salwa, Arfah. 2018. "Pengaruh Komitmen, Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Serta Dampaknya Pada Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh." *Jurnal Magister Manajemen* 2(1): 58–67.
- Saribu, Ardin Dolok. 2017. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Online Internasional & Nasional* 20(1): 91–108.
- Setiyawan, Hari Eka, and Muhammad Safri. 2016. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik , Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bungo." *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 4(1): 51–72.
- Srimulyani, Veronika Agustini. 2016. "Analisis Pengaruh Integrative Leadership Terhadap Organizational Justice , Employee Engagement Dan Organizational Citizenship Behavior." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* (2): 128–44.
- Sujiyanto, ST. 2017. II "Pengaruh Integritas Dan Loyalitas Pegawai Terhadap Kebijakan Pimpinan Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batu."
- Susanto, Dwi, Dian Anggraeni Yusuf, and Yunaita Rachmawati. 2014. "Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik." *Jurnal Paradigma* 12(02): 73–91.
- Uar, Aty. 2016. "Pengaruh Pelaksanaan Prinsip - Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6: 1–11.
- Utami, Ulfa Indri. 2015. "Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Provinsi Riau." *Jom. FEKON* 2.
- Windiarso, Randy Iman. 2015. "Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Goernance Dan Komite Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah." *Naskah Publikasi* (3): e22.
- Yulianti, Wuryanti. 2015. "Pengaruh Kepemimpinan Transformasi Integritas Perilaku Dan Kepercayaan Terhadap Pimpinan Dalam Peningkatan Kinerja SDM." *ISSN 2302 - 9791* Vol. 2 No.: 282–300.